

Vol. 6 No. 1., Mei 2015

ISSN : 2087-1899

# Jurnal Sosio-Humaniora

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
YOGYAKARTA



UNIVERSITAS  
**MERCU BUANA**  
YOGYAKARTA

ISSN 2087 - 1899



9 772 087 1899 54

Terbit 2 kali setiap tahun

# Jurnal Sosio-Humaniora

## **PENANGGUNG JAWAB**

Kepala LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Ketua Umum :  
Dr. Ir. Ch. Wariyah, M.P.

Sekretaris :  
Awan Santosa, S.E., M.Sc.

Dewan Redaksi :  
Dr. Kamsih Astuti, M.A.  
Dr. Hermayawati, M.Pd.

Penyunting Pelaksana :  
Tutut Dwi Astuti, S.E., M.Si.  
Dra. Indra Ratna KW, M.Si.  
Restu Arini, S.Pd., M.Pd.  
Sumiyarsih, S.E., M.Si.

Pelaksana Administrasi :  
Zulki Adzani Sidiq Fathoni  
Hartini

Alamat Redaksi/Sirkulasi :  
LPPM Universitas Mercu Buana Yogyakarta  
Jl. Wates Km 10 Yogyakarta  
Tlpn (0274) 6498212 Pesawat 133 Fax (0274) 6498213  
E-Mail : [lppm.umby@yahoo.com](mailto:lppm.umby@yahoo.com)  
Web : [lppm.mercubuana-yogya.ac.id](http://lppm.mercubuana-yogya.ac.id)

---

Jurnal yang memuat ringkasan hasil laporan penelitian ini diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta, terbit dua kali setiap tahun.

Redaksi menerima naskah hasil penelitian, yang belum pernah dipublikasikan baik yang berbahasa Indonesia maupun Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format di Jurnal Sosio-Humaniora dan harus diterima oleh redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit.

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga Jurnal Sosio-Humaniora Volume 6, No. 1, Mei 2015 dapat kami terbitkan. Redaksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penulis yang telah berkenan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ini,

Pada jurnal Sosio-Humaniora edisi Mei 2015 ini, disajikan beberapa hasil penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris, bidang akuntansi dan bidang psikologi. Pada bidang pendidikan bahasa Inggris disajikan artikel tentang prinsip kesopanan Margaret Thatcher dalam rapat politik pada film *The Iron Lady* dan hubungan antara harga diri dengan kinerja pada perawat rumah sakit di Yogyakarta. Pada bidang akuntansi disajikan artikel tentang pengaruh proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap pengalokasian belanja daerah di pemerintahan kota. Pada bidang psikologi memuat artikel tentang studi kasus pola relasi sosial anak berkebutuhan khusus (ABK) tuna daksa yang berada di SD umum (inklusi), hubungan antara harga diri dengan kinerja pada perawat rumah sakit serta penyusunan penilaian kinerja model *BARS* untuk meningkatkan persepsi karyawan terhadap objektivitas penilaian kinerja.

Redaksi menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyajian artikel dalam jurnal yang kami terbitkan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, agar penerbitan mendatang semakin baik. Atas perhatian dan partisipasi semua pihak, redaksi mengucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Mei 2015

Redaksi

Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 6 No. 1 ini telah *direview* oleh Mitra Bestari :

1. Dr. Dra. Hermayawati, S.Pd., M.Pd. bidang studi Teori Linguistik
2. Awan Santosa, S.E., M.Sc. bidang studi Teori Ekonomi
3. Kamsih Astuti, S.Psi., M.Si. bidang studi Psikologi Sosial

**DAFTAR ISI**

	<b>Hal</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Mitra Bestari</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>PRINSIP-PRINSIP KESOPANAN PADA RAPAT POLITIK MARGARET THATCHER DALAM FILM <i>THE IRON LADY</i></b> .....	<b>1-22</b>
Agustinus Hary Setyawan	
<b>STUDI KASUS POLA RELASI SOSIAL ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) TUNA DAKSA YANG BERADA DI SD UMUM (INKLUSI) DI KOTA METRO</b> .....	<b>23-33</b>
Satrio Budi Wibowo dan Tri Anjar	
<b>HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DENGAN KINERJA PADA PERAWAT RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</b> .....	<b>34-54</b>
Nur Fachmi Budi Setyawan	
<b>HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI DENGAN KINERJA PADA PERAWAT RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA</b> .....	<b>55-72</b>
Listiyani Natalia dan Tutut Dewi Astuti	
<b>PENGARUH PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA DAERAH DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013..</b>	<b>73-89</b>
Endang Sri Utami	
<b>PENYUSUNAN PENILAIAN KINERJA MODEL <i>BARS</i> UNTUK MENINGKATKAN PERSEPSI KARYAWAN TERHADAP OBJEKTIVITAS PENILAIAN KINERJA</b> .....	<b>90-115</b>
Herman Suradiraja	
<b>PEDOMAN PENULISAN NASKAH</b> .....	<b>116</b>

## **ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**Listiyani Natalia dan Tutut Dewi Astuti**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Jl. Wates Km. 10 Yogyakarta 55753

Email : tututdewiastuti@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengelola keuangan daerahnya, dengan menggunakan analisis rasio. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa data atau informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

Kata kunci : Laporan keuangan, Kinerja keuangan, Analisis rasio

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the performance of local government in Sleman District Government in managing the financial area, by using ratio analysis. The types and sources of data used consisted of secondary data, or information relating to the financial statements of the Government of Sleman. The results show that revenue growth in Sleman district government either, in the realization of regional spending is efficient because it does not exceed the budget. However, the dependence of local governments on the central government is still high .*

*Keywords: financial statements, financial performance, analysis of the ratio*

### **PENDAHULUAN**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadikan daerah mempunyai kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan

pengelolaan keuangannya sendiri sehingga pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas, yang kemudian diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis *Accrual* seperti pada lampiran I dan berbasis *Cash toward Accrual* pada lampiran II. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang harus diterapkan secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2015, untuk strategi pentahapan pemberlakuan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan Permendagri Nomor 64

Tahun 2013. Tantangannya apakah pemerintah daerah mampu menerapkan akuntansi yang sepenuhnya sesuai dengan SAP.

Penyajian laporan keuangan mulai tahun 2005 sesuai dengan SAP dapat dilakukan dengan teknik memetakan atau konversi ketentuan-ketentuan di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 ke ketentuan-ketentuan SAP (KSAP, 2006). Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* sehingga kinerja dari pemerintahan yang bersangkutan diharapkan akan semakin mudah untuk dinilai baik oleh kalangan tertentu maupun oleh masyarakat luas.

Sehingga upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan

keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan sejenis petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) melalui Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang "Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan

sesuai dengan SAP. Penerapan sistem akuntansi diharapkan mampu membenahi sistem pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai birokratis yang tidak efisien, lambat, dan tidak efektif.

Laporan keuangan pemerintah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum. Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan serta dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menyajikan informasi yang secara wajar bebas dari salah saji material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan keuangan sehingga dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria

karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah ini disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan batas waktu penyampaian laporan keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya dalam merealisasikan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

#### **RUMUSAN MASALAH**

1. Sejauh mana efektifitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten

Sleman dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

2. Sejauh mana tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Sleman.

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
2. Untuk mengetahui tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Sleman

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. KEUANGAN DAERAH**

Mamesah (dalam Halim, 2007) menyatakan bahwa “keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum

dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”. Pemerintah daerah selaku pengelola harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

#### **B. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Menurut Halim dalam buku *Pengelolaan Keuangan Daerah (2007)*, bahwa : “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tidak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota, tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikonsolidasikan oleh PPKD.

### **C. LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan pemerintah yang harus dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya

dengan baik atau tidak. Salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Hasil rasio keuangan ini selanjutnya akan digunakan untuk tolok ukur dalam:

- a) Mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- b) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

Penggunaan analisa rasio terhadap laporan keuangan pemerintah daerah belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur,

demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisa rasio terhadap APBD perlu dilakukan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwasanya lembaga ini adalah melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

## **B. Populasi dan Sampel Penelitian**

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa:

1. Profil Pemerintah Kabupaten Sleman
2. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010,2011 dan 2012
3. Buku-buku, referensi, jurnal-jurnal, literatur, maupun sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

## **C. Sumber Data**

### **1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

- a. Laporan Realisasi Anggaran  
Merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan (PSAP 01, 2005)

### **b. Neraca**

Merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (PSAP 01, 2005)

### **c. Laporan Arus Kas**

Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas dari pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (PSAP 01,2005)

### **2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005**

Peraturan Pemerintah ini terdiri dari atas delapan buah pasal yang menguraikan tentang pengantar SAP pada bagian awal dan empat pasal tentang sebelas PSAP.Selain itu, di dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan mengenai definisi

SAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

### **3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010**

Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

### **4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara melakukan proses auditing yang dilakukan oleh profesi akuntan ataupun dengan menggunakan analisis kinerja keuangan dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Penilaian atas kinerja keuangan pemerintah daerah diharapkan akan memberikan manfaat untuk memonitor perkembangan keadaan keuangan yang ada di pemerintah daerah.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penulisan skripsi ini, metode/teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Dimaksudkan untuk memperoleh bahan yang diperlukan, menggunakan bahan-bahan pustaka berupa literatur-literatur atau buku-buku atau berupa karya ilmiah yang sesuai dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Disamping itu juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan materi dimaksud, dalam hal ini yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

#### **2. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan atau *field research* disini dimaksudkan bahwa disamping menggunakan literatur seperti dikemukakan diatas, secara langsung melakukan penelitian di

lapangan, yaitu langsung pada sasaran atau lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh data, digunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yaitu melakukan penghimpunan data-data sekunder seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

**E. Metoda Analisis data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif dalam bentuk studi kasus, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Data laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk Neraca, dan Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah.

Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah ada beberapa metode, menurut Mahmudi antara lain:

1. Untuk mengukur sejauh mana efektifitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya:

**a. Analisis Varians Pendapatan**

Analisis varians pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

$\frac{\text{Analisis Varians Pendapatan}}{\text{Pendapatan}} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$
--

Sumber : Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2009)

**b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan**

Analisa pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami

pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatifkah. Semakin tinggi prosentase pertumbuhan pendapatan, maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Th t} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th t}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2009)

**c. Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (yang dianggarkan). Rasio efektifitas pendapatan daerah

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektifitas penerimaan PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2009)

Tabel 1.1. **Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan**

KATEGORI	PREDIKAT
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

Sumber : Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2009)

**d. Analisis Keserasian Belanja**

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka

perlu membuat harmonisasi belanja. Analisa keserasian belanja antara lain berupa:

1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menjelaskan mengenai porsi belanja yang dialokasikan untuk belanja operasi.

$$\frac{\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja}}{\text{Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja}} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2009)

2. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja

modal terhadap total belanja. Rasio ini menjelaskan porsi belanja yang dialokasikan dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan.

$$\frac{\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja}}{\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja}} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2009)

**e. Analisis Efisiensi Belanja**

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur

tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif.

$$\frac{\text{Rasio Efisiensi Belanja}}{\text{Belanja}} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2009)

**2. Untuk menilai tingkat kemandirian daerah:**

**a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam

membayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\frac{\text{Rasio kemandirian keuangan daerah ini dirumuskan sebagai berikut : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah}}{\text{Keuangan Daerah}} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer + Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2009)

**b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang

diterima oleh daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah

pusat dan atau pemerintah provinsi.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2009)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio	2010	2011	2012
Varians Pendapatan	99,88%	103,06%	107,06%
Pertumbuhan Pendapatan	-	16,46%	107,50%
Efektifitas PAD	99,71%	111,46%	124,92%
Belanja Operasi terhadap Total Belanja	87,41%	89,36%	87,36%
Belanja Modal terhadap Total Belanja	8,82%	7,52%	9,32%
Efisiensi Belanja	90,94%	92,82%	89,07%
Kemandirian Keuangan Daerah	17,86%	21,23%	23,39%
Ketergantungan Keuangan Daerah	83,05%	81,04%	80,62%

#### Hasil Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012

Hasil analisis varians merealisasikan pendapatan melebihi pendapatan pada tahun 2010, anggaran/target yang telah realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mencapai ditetapkan. Selisih ini merupakan target yakni hanya mencapai 99,88%, selisih yang diharapkan (*favourable variance*). Berdasarkan analisis pertumbuhan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Sleman realisasi pendapatan berhasil mengalami kenaikan mencapai 103,06% dan 107,77%. Hal pertumbuhan pendapatan, jika ini menunjukkan kinerja pendapatan dibandingkan dengan tahun 2010, yang baik karena Pemerintah tahun 2011 mengalami kenaikan Kabupaten Sleman dapat sebesar 16,46% dan 17,50% pada

tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2011, ini menunjukkan tren yang positif dimana setiap tahun Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil mempertahankan dan meningkatkan realisasi pendapatan dari tahun-tahun yang sebelumnya.

Berdasar hasil analisis efektifitas PAD antara tahun 2010 sampai 2012, dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami tingkat efektifitas terendah yaitu 99,71%, presentase tersebut masuk dalam kategori cukup efektif mendekati efektif karena hampir mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 mobilisasi Pemda Kabupaten Sleman dalam mencapai target PAD dapat dikatakan sangat efektif karena mencapai 111,46% dan 124,92%. Hasil analisis rasio belanja operasi terhadap total belanja pada tahun 2010 sebesar 87,41%, kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2011 menjadi 89,36%, dan pada

tahun 2012 turun menjadi 87,36%. Hasil analisis rasio belanja modal terhadap total belanja pada tahun 2010 sebesar 8,82%, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2011 menjadi 7,52%, dan kembali naik pada tahun 2012 menjadi 9,32%. Rasio efisiensi belanja pada tahun 2010 sebesar 90,94% hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman sudah berusaha untuk melakukan efisiensi dalam membelanjakan anggarannya, akan tetapi untuk tahun 2011 mengalami penurunan efisiensi dalam membelanjakan anggaran hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya presentase hasil perhitungan analisis rasio efisiensi yaitu sebesar 92,82%, sedangkan pada tahun 2012 penggunaan anggaran untuk belanja daerah dapat kembali ditekan dengan presentase sebesar 89,07%.

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membiayai belanja dengan menggunakan

penerimaan PAD masih cukup rendah. Pada tahun 2010 rasio kemandirian mencapai 17,86%, tahun 2011 sebesar 21,23% dan pada tahun 2012 sebesar 23,39%.

Hal ini menunjukkan peningkatan rasio kemandirian dari tahun ke tahun akan tetapi Pemerintah Kabupaten Sleman harus terus meningkatkan mobilisasi penerimaan PAD agar rasio kemandirian daerahnya bisa terus meningkat. Ketergantungan Pemda Kabupaten Sleman pada Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi, hal ini tercermin dari hasil analisis ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer dari Pemerintah pusat pada tahun 2010 menunjukkan angka 83,05%, kemudian menurun ke angka 81,04% pada tahun 2011 dan menurun lagi pada tahun 2012 sebesar 80,62%. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk mulai mengurangi

ketergantungan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat.

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam merealisasikan penerimaan pendapatan menunjukkan kinerja yang baik, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya hasil analisis varians pendapatan dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis pertumbuhan pendapatan. Dan hal ini menunjukkan mobilisasi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan PAD berhasil dengan sangat efektif dengan pencapaian realisasi PAD

yang melebihi dari anggaran/target, sebagaimana terlihat dalam analisis efektivitas PAD yang terus naik dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Sleman sudah cukup efisien dalam membelanjakan anggarannya, ditunjukkan dengan realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dari hasil analisis efisiensi belanja. Belanja lebih didominasi oleh belanja operasi, dibanding belanja modal, seperti yang terlihat dari analisis rasio belanja operasi terhadap total belanja dan analisis rasio belanja modal terhadap total belanja.

2. Masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer dari Pemerintah Pusat ataupun Propinsi terlihat dari hasil analisis Rasio ketergantungan keuangan daerah, hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Sleman

dalam membiayai belanja dengan menggunakan penerimaan PAD.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2001. "Privatisasi di Indonesia : Teori dan Implementasi", Jakarta: Salemba Empat
- Darise, Nurlan. 2008. "Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)." Jakarta : Indeks
- Halim, Abdul.2007. "Pengelolaan Keuangan Daerah". Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul 2012 "Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah". Jakarta : Salemba Empat
- Hariadi, Pramono dkk, 2010. "Pengelolaan Keuangan Daerah". Jakarta : Salemba Empat
- <http://slemankab.go.id>
- Mahmudi, 2010."Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Depdagri RI.

Republik Indonesia, Undang-Undang  
Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  
Nomor S.900/316/BAKD  
tentang "Pedoman Sistem Dan  
Prosedur Penatausahaan dan

Akuntansi Pelaporan dan  
Pertanggungjawaban  
Keuangan Daerah". 2006.  
Depdagri RI.

Soffan Marsus, 2006. Jakarta : LPKP-  
BPPK.



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
YOGYAKARTA**

Jl. Wates Km 10 Yogyakarta  
Tlp (0274) 6498212 Pesawat 133 Fax. (0274) 6498213

[www.mercubuana-yogya.ac.id](http://www.mercubuana-yogya.ac.id)  
email : [lppm.umby@yahoo.com](mailto:lppm.umby@yahoo.com)



**ISSN : 2087-1899**